BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian tidak berkembang dengan cara instan, melainkan melalui tahapan pembangunan terstruktur, mencakup proses penyesuaian dalam struktur ekonomi suatu negara/wilayah untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini merupakan usaha jangka panjang untuk fokus pada peningkatan pendapatan riil per kapita, yang juga diiringi dengan perbaikan sistem kelembagaan guna menunjang kualitas hidup penduduk (Wiasih and Karmini, 2021). Tentunya, proses ini tidak hanya menitik beratkan pada peningkatan *output* ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) saja, namun juga pada penyempurnaan dari sudut pandang fundamental lainnya. Upaya dalam pembangunan ekonomi mencakup semua hal yang berkaitan dengan kapasitas produksi dan efesiensi ekonomi melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, teknologi, dan inovasi sehingga produktivitas tenaga kerja dan daya saing global meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dan pencapaian pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang erat karena keduanya merupakan gagasan yang saling terkait. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mengikuti perluasan pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung yang melibatkan berbagai sektor, seperti industri, infrastruktur, dan layanan publik. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi, inovasi, dan perluasan lapangan kerja.

Strategi pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ekonomi yang terjadi di wilayah-wilayah regional untuk mendorong pemerataan pertumbuhan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan melalui perluasan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang lebih adil (Ardiansyah and Huda, 2023). Keterbukaan kesempatan kerja yang merata menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan proses pembangunan ekonomi, khususnya pada negara berkembang.

Pembangunan di kota-kota besar di Indonesia berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga kota-kota tersebut menjadi tujuan bagi penduduk yang mencari peluang kerja (Harahap, 2013). Dalam konteks ekonomi regional, hal ini berkaitan dengan konsep aglomerasi, di mana konsentrasi aktivitas ekonomi di suatu wilayah menarik lebih banyak tenaga kerja dan investasi. Untuk menilai perkembangan ekonomi suatu wilayah, PDRB sering dijadikan sebagai ukuran utama. PDRB berperan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah karena mencerminkan total output barang dan jasa suatu wilayah dalam periode tertentu, serta mengungkapkan ketimpangan ekonomi antarwilayah memberikan gambaran mengenai kesenjangan ekonomi antar wilayah, yang menjadi salah satu fokus utama dalam studi ekonomi regional.

Empat (4) kategori wilayah pembangunan ditetapkan oleh Freidman dan Alonso, meliputi : wilayah perbatasan, wilayah metropolitan, poros pembangunan, dan wilayah tertekan. (Adisasmita, 2005). Kawasan Metropolitan sering kali diposisikan sebagai inti dari aktivitas regional atau kutub pertumbuhan karena berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, dan pemerintahan. Kota-kota besar ini memiliki fasilitas lengkap yang memengaruhi

perkembangan daerah sekitarnya (Priyarsono and Sahara, 2007). Berdasarkan publikasi Badan Statistik Indonesia, kontribusi wilayah metropolitan, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten terhadap PDB nasional mencapai 30%. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi, infrastruktur yang lebih maju, serta jumlah penduduk yang tinggi di wilayah tersebut.

Grafik 1.1 Kontribusi PDRB Wilayah JABODETABEK terhadap PDB Nasional (Persen)

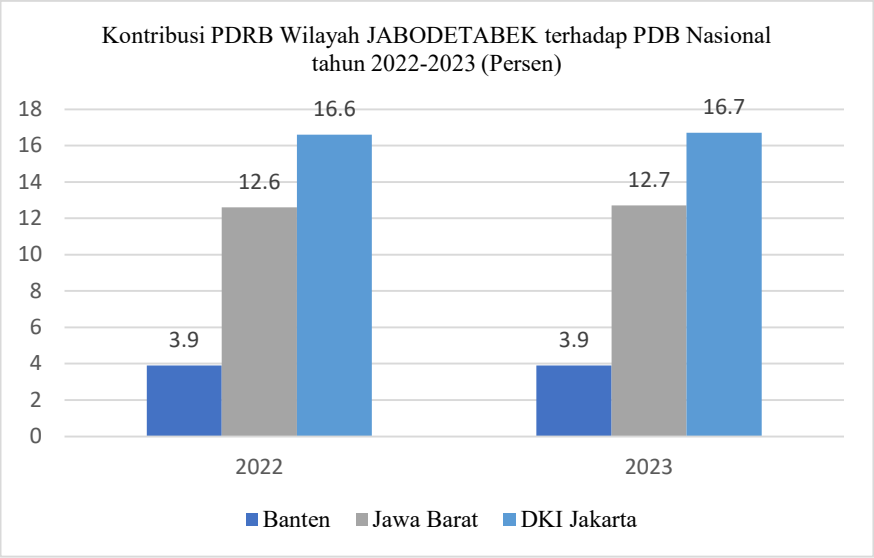

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Sebagai ibu kota, Provinsi DKI Jakarta memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional. Berdasarkan publikasi Badan Statistik Indonesia (2023), Provinsi DKI Jakarta berkontribusi 16,6% terhadap PDB Nasional. Tingginya kontribusi PDRB Jakarta tidak terlepas dari peran daerah sekitarnya, seperti daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta yaitu Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan

Gambar 1.1 Peta Kawasan Jabodetabek

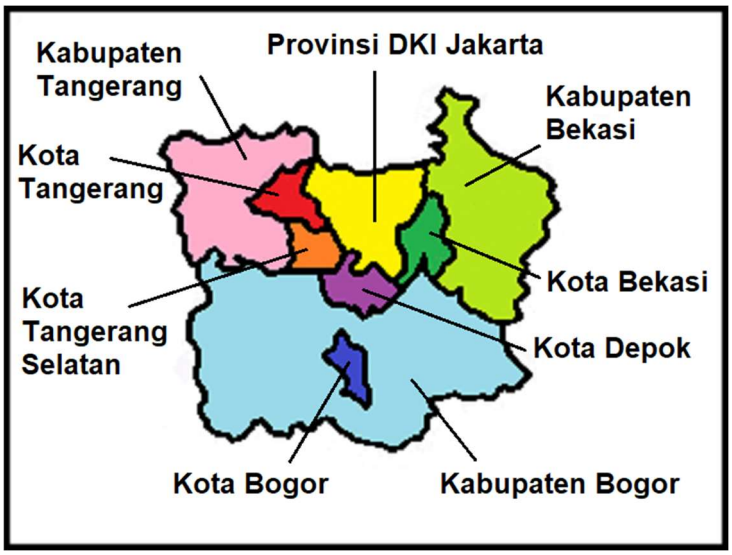

Sumber : (*maps*-Jakarta, 2025)

Pemilihan wilayah Jabodetabek sebagai objek penelitian didasari oleh peran strategis kawasan-kawasan tersebut dalam menopang aktivitas ekonomi DKI Jakarta. Daerah penyangga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para pekerja Jakarta, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Daerah-daerah penyangga tersebut berperan sebagai pusat industri, kawasan pemukiman, serta penyedia tenaga kerja bagi Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan ini diperkuat oleh laporan resmi terkait indeks produksi industri manufaktur berdasarkan KBLI manufaktur di Indonesia masih terkonsentrasi di bagian barat, dengan Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar, yakni 23,18% dari total industri manufaktur nasional, terutama melalui industri kendaraan bermotor. Di sisi lain, Provinsi Banten menyumbang 10,42%, dengan industri bahan kimia dan produk turunannya sebagai sektor unggulan (Direktorat Statistik Industri, 2024). Daerah penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi masih bergantung pada sektor industri sekunder, seperti manufaktur, dibandingkan

dengan Jakarta yang didominasi oleh sektor tersier, seperti jasa, perdagangan, dan keuangan.

Cahyadi and Surtiari (2009) pada penelitiannya menjelaskan bahwa sejak ditetapkannya Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagai kawasan penyangga pada tahun 1976, serta bergabungnya Kota Depok dalam pengembangan metropolitan Jakarta pada tahun 1999, daerah-daerah ini dirancang untuk mendukung ibu kota. Wilayah penyangga tersebut berperan sebagai area permukiman, sementara sektor industri dan pertanian bertugas memenuhi kebutuhan dasar penduduk Jakarta. Seiring berjalannya waktu, kawasan-kawasan ini terus berkembang menjadi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat. Terpusatnya perekonomian dan ketersediaan berbagai macam infrastruktur menyebabkan pertumbuhan penduduk DKI Jakarta sangat tinggi.

Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Wilayah Jabodetabek (Persen)

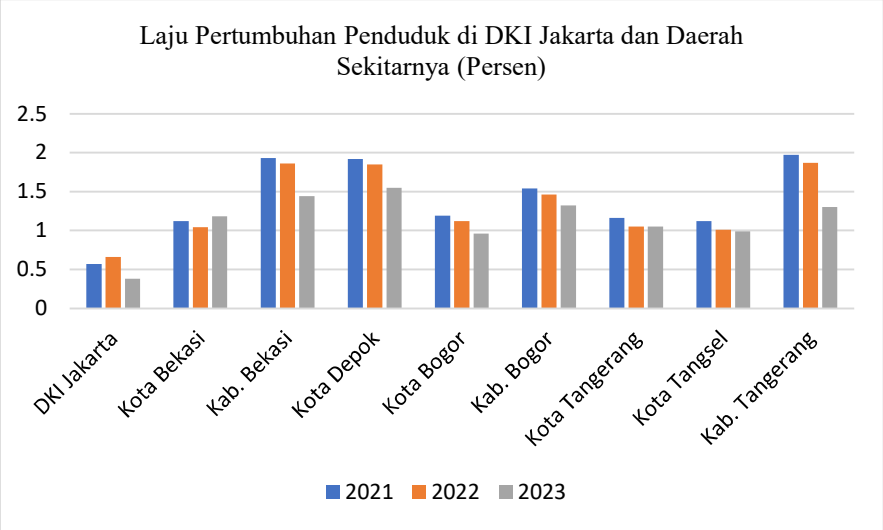

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Merujuk pada Grafik 1.2, terlihat bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta cenderung menurun. Sebaliknya, wilayah penyangga seperti Bekasi,

Tangerang, dan Depok menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi meskipun tidak stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak individu yang bekerja di Jakarta namun memilih menetap di kota-kota sekitarnya, sementara DKI Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi. Banyak penduduk penyangga bekerja di Jakarta sebagai komuter. Di sisi lain, wilayah penyangga juga mulai tumbuh sebagai pusat industri dan ekonomi baru, sehingga turut menyerap tenaga kerja secara lokal. Peningkatan populasi usia kerja tanpa dibarengi pertumbuhan lapangan kerja yang memadai menyebabkan pengangguran dan membatasi manfaat bonus demografi (Kalsum and Faisal Fadli, 2024).

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan tingginya mobilitas tenaga kerja di DKI Jakarta serta daerah penyangganya, dinamika ketenagakerjaan menjadi faktor krusial dalam perekonomian wilayah ini. Meskipun Jakarta menjadi pusat aktivitas ekonomi, pertumbuhan lapangan kerja tidak selalu sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja. Setiap tahun, data ketenagakerjaan menunjukkan perubahan pada jumlah tenaga kerja serta tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Grafik 1.3 TPT Provinsi Wilayah Jabodetabek (persen)

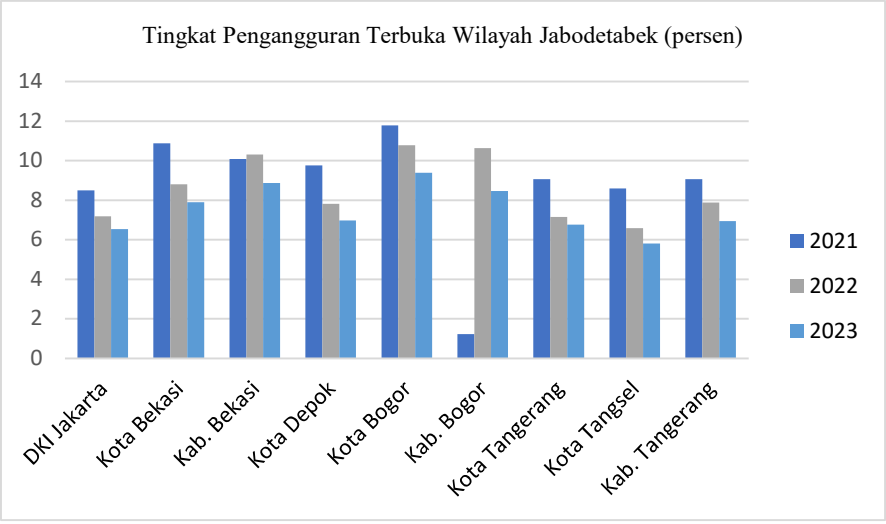

Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Grafik TPT DKI Jakarta dan daerah penyangganya 2021-2023 secara umum menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dan pemulihan akibat pandemi, namun meskipun demikian, Isu terkait penyerapan tenaga kerja masih menjadi fokus utama di pusat kota, dan permasalahan ini turut berdampak luas hingga ke wilayah penyangga DKI Jakarta. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan di Jakarta mencari peluang di daerah penyangga, meningkatkan persaingan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor informal. Selain itu, urbanisasi terbalik berpotensi menambah beban ekonomi di daerah tersebut. Dengan demikian, meningkatnya pengangguran di Jakarta turut memengaruhi stabilitas ekonomi di wilayah sekitarnya.

Proses penyerapan tenaga kerja terjadi ketika angkatan kerja, mencakup populasi bekerja dan penganggur memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi dan pendidikannya. Peningkatan populasi menambah jumlah angkatan kerja, sehingga tenaga kerja produktif juga meningkat. (Faelassuffa Assa and Eppy Yuliani, 2021). Kebijakan upah minimum memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah dalam penyerapan tenaga kerja, karena produsen harus menanggung upah minimum sebagai salah satu komponen biaya, yang diberikan sebagai imbalan atas kontribusi tenaga kerja dalam proses produksi (Wihastuti and Rahmatullah, 2018). Perbaikan kebijakan upah minimum dan penciptaan lapangan kerja dapat menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan (Wasilaputri, 2016).

Grafik 1.4 Upah Minimum Wilayah Jabodetabek Tahun 2021-2023 (rupiah)

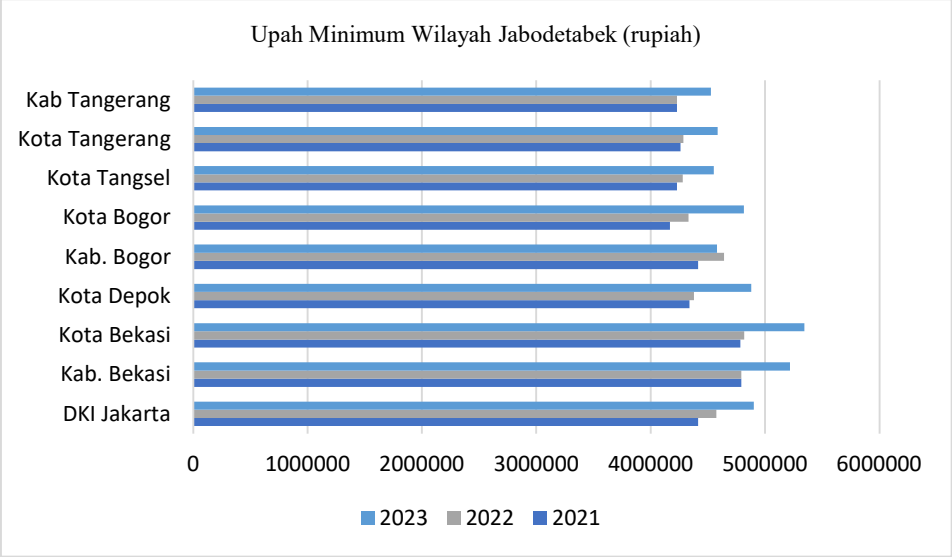

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Grafik tersebut menunjukkan upah minimum di DKI Jakarta dan daerah sekitarnya mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Kabupaten dan Kota Bekasi cenderung memiliki upah minimum lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya. Peningkatan upah minimum ini mencerminkan dinamika ekonomi di wilayah Jabodetabek, yang dipengaruhi oleh faktor seperti pertumbuhan industri, investasi, serta biaya hidup yang semakin meningkat. Kesenjangan upah antara daerah-daerah tersebut juga dapat memengaruhi distribusi tenaga kerja, di mana pekerja mungkin lebih memilih bekerja di daerah dengan upah lebih tinggi.

Penetapan upah minimum dibuat untuk menjamin pekerja berpenghasilan rendah memperoleh upah yang layak, serta membantu meningkatkan pendapatan mereka melalui pengaturan jam kerja tambahan. Namun, ketika upah minimum dinaikkan, perusahaan dapat mengurangi jumlah karyawan, sehingga penyerapan tenaga kerja menurun karena biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan meningkat (Rahayu, 2019).

Namun penelitian Kurniawati dan Setiawati (2024) menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dianggap sebagai stimulan yang mendorong tenaga kerja dengan keterampilan tertentu untuk berpartisipasi secara aktif di pasar tenaga kerja. Kenaikan upah minimum dapat menarik investor ke suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika penanam modal memilih tempat untuk berinvestasi, upah yang tinggi akan menjadi faktor yang penting. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan upah minimum, suatu daerah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kondisi yang akan mendorong penanam modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Kurniawan and Imaningsih, 2024).

Penanaman modal dalam negeri berperan dalam menyerap tenaga kerja karena mendorong penggunaan faktor produksi baru, yang pada akhirnya menciptakan aktivitas ekonomi produktif dan membuka lebih banyak lapangan kerja (Susanti and Indra, 2022). Setiap modal yang masuk ke suatu daerah memerlukan tenaga kerja untuk mengelola sumber daya yang ditanamkan. Ketika modal dialokasikan dalam bentuk pembangunan industri, pengembangan usaha ini akan membuka banyak peluang kerja baru. Oleh karena itu, peran investasi domestik sangat penting dalam menciptakan kesempatan kerja pada suatu wilayah.

Grafik 1.5 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Wilayah Jabodetabek (juta rupiah)

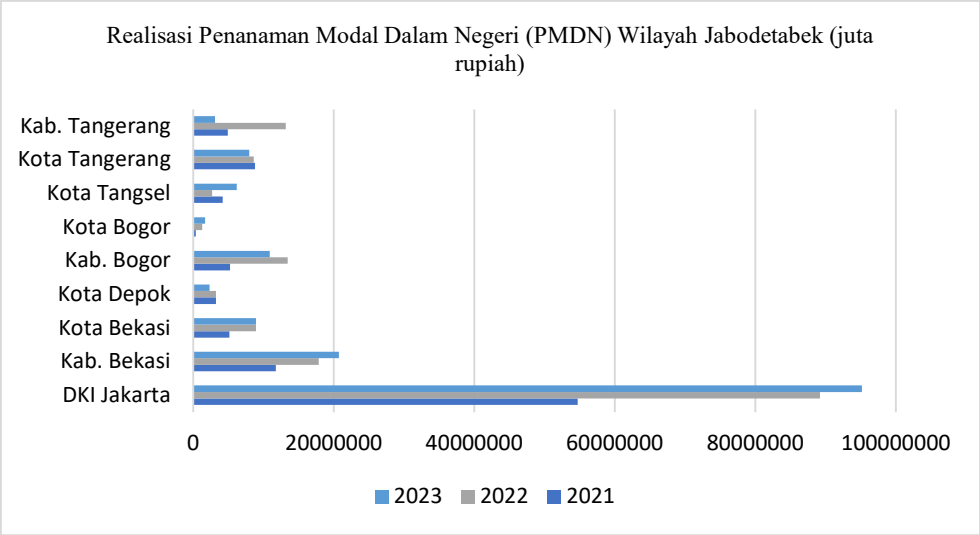

Sumber : DPMPTS (2023)

Berdasarkan grafik 1.6, realisasi PMDN tahun 2023 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki nilai investasi yang jauh lebih besar dibandingkan kota/kabupaten lain di sekitarnya. Fenomena ini mencerminkan bahwa DKI Jakarta tetap menjadi pusat utama investasi dalam negeri, yang menunjukkan daya tariknya sebagai lokasi bisnis dan industri utama.

Hal ini mencerminkan tingginya minat investor domestik untuk menanamkan modal di wilayah tersebut. Semakin banyak modal yang masuk ke pasar akan mendorong ekspansi bisnis dan peningkatan serapan tenaga kerja, sehingga tenaga kerja akan terserap lebih banyak di DKI Jakarta dan Jawa Barat seiring dengan meningkatnya nilai PMDN yang ditunjukkan dalam grafik. Namun penelitian (Widya Putra, Ariani and Nofrian, 2022) menunjukkan hasil yang bertolak belakang, investasi domestik tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja tidak terserap lebih banyak.

Selain upah minimum dan investasi dalam negeri, usaha mikro dan kecil turut berkontribusi pada tenaga kerja yang terserap. Peningkatan kuantitas unit usaha

membantu mengurangi pengangguran melalui terciptanya kesempatan kerja baru (Abadi, 2024). Walaupun dihadapkan pada berbagai kendala, peran industri mikro dan kecil dalam menciptakan lapangan kerja baru sangat penting untuk memastikan industri mikro dan kecil terus berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian (Lestari and Santoso, 2024).

Grafik 1.6 Jumlah Perusahaan Mikro dan Kecil Wilayah Jabodetabek (unit)

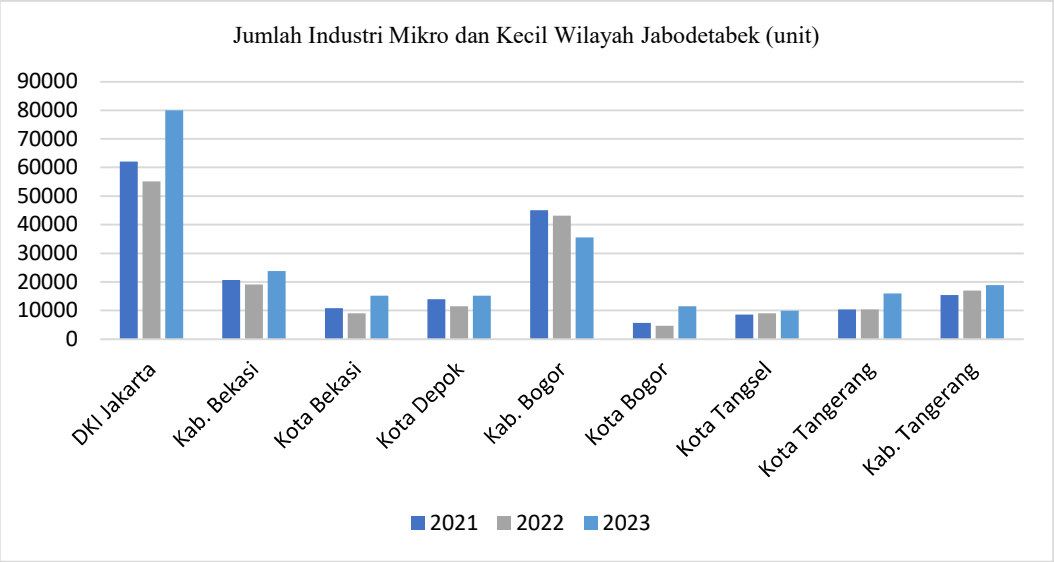

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan grafik jumlah perusahaan mikro dan kecil di DKI Jakarta serta daerah sekitarnya pada 2021-2023, terlihat bahwa Jakarta memiliki jumlah perusahaan mikro dan kecil terbanyak dibandingkan kota dan kabupaten lain di sekitarnya. Pada 2023, jumlah perusahaan mikro dan kecil di Jakarta meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara di daerah penyangga seperti Kota Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor juga mengalami pertumbuhan meskipun dalam skala lebih kecil.

Kota-kota sekitar Jakarta berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi ibu kota, khususnya bagi usaha mikro dan kecil. Keterbatasan lahan dan tingginya

biaya di Jakarta mendorong pelaku usaha berpindah ke daerah penyangga yang lebih terjangkau. Didukung oleh infrastruktur dan konektivitas yang semakin baik, wilayah ini semakin diminati sebagai pusat pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang menopang ekonomi Jakarta.

Ekspansi usaha mikro dan kecil dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kapasitas produksi suatu wilayah, baik untuk barang maupun jasa, yang kemudian dicatat sebagai bagian dari produk domestik regional (Rohadin and Yanah, 2019). Walaupun kontribusinya mengalami fluktuasi setiap tahun, peran industri ini terus memberikan manfaat nyata dalam hal penyerapan tenaga kerja. Ketika jumlah industri meningkat, output akan terdorong naik, dengan demikian peluang kerja semakin bertambah dan penyerapan tenaga kerja semakin meluas.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis efek upah minimum, PMDN, dan jumlah IMK di semua subsektor terhadap serapan pekerja di DKI Jakarta dan daerah penyangganya, sehingga peneliti menentukan judul tentang **"Analisis Pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Jumlah Industri Mikro dan Kecil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Jabodetabek"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut adalah rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Jabodetabek?
2. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Jabodetabek?
3. Apakah Jumlah Industri Mikro dan Kecil berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Jabodetabek?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Jabodetabek.
2. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Jabodetabek.
3. Menganalisis Pengaruh Jumlah Industri Mikro dan Kecil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Jabodetabek.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Kajian ini mengkonsentrasikan pembahasan terhadap wilayah Jabodetabek yang mencakup 9 kabupaten/kota, yaitu DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang selama tahun 2017–2023. Analisis

dilakukan secara kuantitatif berdasarkan data sekunder yang bersumber dari laporan BPS serta lembaga terkait lainnya. Penelitian ini juga mengacu pada studi sebelumnya yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis. Cakupan kajian mencakup analisis perbedaan karakteristik wilayah dan ketenagakerjaan, dengan meninjau faktor-faktor ekonomi seperti kebijakan upah minimum, investasi dalam negeri, serta kontribusi jumlah industri mikro kecil terhadap penyerapan tenaga kerja.

1.5 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, seperti

1. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini berupaya menyediakan dasar ilmiah bagi perancangan kebijakan yang dapat mengoptimalkan penciptaan pekerjaan dan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta dan wilayah penyangganya.

2. Bagi Universitas

   Penelitian ini diharapkan menambah literatur khususnya bagi program studi ekonomi pembangunan dan dapat digunakan sebagai materi perkuliahan terkait ketenagakerjaan.

3. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan menjadi panduan riset selanjutnya dan memperdalam pemahaman dalam menganalisis pengaruh variabel ekonomi terhadap ketenagakerjaan.